

ANALISIS PENETAPAN 'KETENGBAN' SEBAGAI DAERAH OTONOM BARU DARI WILAYAH PEGUNUNGAN BINTANG

Emius Gire¹⁾, Bernathius Julison²⁾, Petrus Bahtiar³⁾

¹⁾ Mahasiswa Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota
Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih

^{2), 3)} Program Magister Perencanaan Wilayah dan Kota
Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih

Alamat Korespondensi
e-mail: gireemius77@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of the study was to analyze the determination of 'Ketengban' as a New Autonomous Region from the Bintang Mountains Region. The type of research used is descriptive qualitative. Data collection techniques are interviews, observation and documentation. Data analysis techniques: Data reduction, Data presentation, Drawing conclusions or verification. The results of his research, first It is necessary to establish a new autonomous region from the Bintang Mountains Region, implemented in accordance with the provisions of the Unitary State of the Republic of Indonesia having regulations governing regional government in accordance with the mandate of the 1945 Constitution, the government shall enact Law Number 2 of 2021 as a replacement for Law Number 21 of 2001 on special autonomy for Papua Province. Second Matters that concern the stipulation of 'Ketengban' as a New Autonomous Region from the Bintang Mountains Region that is carried out in accordance with the regulations can be seen in the Brief Report of the Commission II DPR RI public hearing meeting which has stated that the DPRD and the Regional Government of the Bintang Mountains Regency submitted administrative completeness submitted to Commission II of the DPR RI. Third, What benefits can be obtained from the stipulation of 'Ketengban' as a New Autonomous Region, which can be seen in improving the standard of living and welfare of the community, Gunung Bintang Regency, Papua Province. In addition, the Bintang Mountains of Papua Province, in developing or developing their regions, are experiencing an accelerated increase.

Keywords: Sentani City, Jayapura Regency, slum settlement, infrastructure

1. PENDAHULUAN

Alasan paling mengemuka dalam wacana pemekaran daerah adalah sejalan dengan semangat otonomi daerah; beberapa provinsi, kabupaten, dan kota dianggap memiliki wilayah terlalu luas sehingga diperlukan upaya untuk memudahkan pelayanan administrasi dan pemangkasan birokrasi dari ibu kota provinsi ke daerah dengan cara pemekaran, yaitu dengan penyatuan beberapa kabupaten/kota menjadi provinsi baru, maupun

penyatuan beberapa kecamatan/kelurahan menjadi kabupaten/kota baru.

Otonomi daerah adalah daerah yang memiliki *legal self sufficiency* yang bersifat *self government* yang di atur dan diurus oleh *own law*, oleh karena itu otonomi daerah lebih menitik beratkan pada aspirasi dari pada kondisi (Ridwan dan Sudradjat, 2014). Daerah otonom adalah bagian organis daripada negara, maka daerah otonom mempunyai kehidupan sendiri yang bersifat mandiri dengan kata lain tetap terikat dengan negara kesatuan.

Daerah otonom ini merupakan masyarakat hukum yaitu berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (Ibrahii, 1991). Dengan demikian otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri (Suryaninrat; 1985).

Pada dasarnya pemekaran wilayah bertujuan untuk memperpendek rentang pemerintahan agar tercipta pelayanan publik yang lebih baik dan lebih dekat dengan masyarakat demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Pengaturan mengenai hal tersebut harus mampu membuat persyaratan bahwa adanya suatu daerah otonom memungkinkan kemajuan suatu daerah. Mengingat salah satu tujuan hukum merupakan sarana pembaharuan masyarakat yang di dasarkan atas anggapan adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan atau pembaharuan itu, maka hukum suatu yang diinginkan atau bahkan dipandang (mutlak) perlu (Sumartini, 1999).

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan tugas ini antara lain menumbuh kembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan (Widjaja, 2005).

Menurut Blakely (1989:59) pembangunan ekonomi daerah adalah berkaitan dengan suatu proses, yaitu yang mencakup pembentukan institusi atau lembaga-lembanga baru, pembangunan industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk jasa yang lebih baik, indentifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan (transfer of knowledge) pengembangan perusahaan-perusahaan baru.

Sementara itu, Arsyad (1999:298) mengemukakan bahwa pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya yang ada dalam membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru merangsang perkembangan kegiatan ekonomi

dalam wilayah tersebut. Lebih lanjut Ahmad (1993:444) mengemukakan bahwa bagi daerah, pembangunan ekonomi seyogyanya berarti peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah secara luas melalui peningkatan konsumsi berbagai barang dan jasa melalui penambahan produksi lapangan kerja yang memberikan kenaikan pendapatan masyarakat.

Dengan demikian, peningkatan kesejahteraan masyarakat luas akan sangat tergantung dari besar sumberdaya yang dapat di investasikan dalam usaha produktif di daerah, dan apakah arah investasi yang menjadi pilihan dapat mewujudkan peningkatan pendapatan masyarakat.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang baru yaitu Tito Karnavian menjelaskan, ada beberapa aspirasi pemekaran di Papua dan Papua Barat, antara lain; Provinsi Papua Tabi Saireri, Provinsi Pegunungan Tengah, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Barat, serta Provinsi Papua Barat Daya.

Spirit pemekaran Papua, menurut Mendagri, adalah karena luasnya wilayah dan perlu adanya percepatan pembangunan di tanah Papua, serta upaya memperteguh keutuhan wilayah Indonesia. Akar utama masalah gangguan keamanan disana adalah masalah ekonomi, masalah kemiskinan dan lain-lain, sehingga pemekaran menjadi salah satu upaya untuk mempercepat pembangunan dan mempermudah birokrasi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kualitatif, dalam penelitian kualitatif ada beberapa asumsi yang mendasarinya, seperti yang dikemukakan oleh Creswell (2015: 145) Penelitian kualitatif lebih memberikan makna pada proses daripada hasil.

Adapun penelitiannya adalah deskriptif kualitatif, dimana metode deskriptif mencari teori bukan menguji teori. Ciri lain metode deskriptif kualitatif ialah menitikberatkan pada observasi dan suasana alamiah (*natural setting*). Peneliti terjun

langsung ke lapangan, bertindak sebagai pengamat, lalu membuat kategori perilaku, mengamati gejala, dan mencatatnya dalam buku observasi (instrumennya adalah pedoman observasi). Serta melakukan wawancara dan mendokumentasikan setiap peristiwa yang terjadi di lapangan secara rinci dan sistematis. Dengan demikian, penelitian yang dilakukan secara *survey* berdasarkan metode deskriptif tentang fenomena yang diteliti.

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu rumusan pada kategori dan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja yang disarankan untuk menganalisis data (Moelong, J, 2014). Miles dan Huberman (2009:16-19) mengemukakan bahwa terdapat langkah-langkah dalam analisis data adalah reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Pegunungan Bintang merupakan daerah otonom baru di Provinsi Papua yang dimekarkan pada tahun 2002. Kabupaten Pegunungan Bintang merupakan pecahan atau hasil pemekaran dari Kabupaten Jayawijaya (kabupaten induk), dimana dalam proses pembangunan daerahnya mengalami banyak kendala, seperti ketertinggalan dibandingkan dengan daerah lainnya.

Untuk distrik daerah induk sebanyak 34 Distrik bila sudah dimekarkan induk hanya menjadi 20 Distrik dan untuk calon kabupaten Ketengban memiliki 14 Distrik.

Lalu untuk jumlah kampung di daerah induk sebanyak 277 Kampung dan nanti bila sudah dimekarkan berubah menjadi 151 Kampung dan calon Kabupaten Ketengban memiliki 126 Kampung. Kemudian untuk Ibukota di induk adalah tetap di Oksibil dan untuk calon ibukota di daerah Ketengban nantinya direncanakan di Teiraplu.

Kabupaten Ketengban memiliki batas wilayah sebelah utara dengan Jayapura dan Keerom, sebelah selatan berbatasan dengan Pegunungan

Bintang, sebelah barat berbatasan dengan Yahukimo dan sebelah timur berbatasan langsung dengan negara PNG. Saat ini jarak tempuh terjauh dari Distrik Murkim dan Batani ke Oksibil kurang lebih 14 hari perjalanan. dengan demikian alasan perbatasan dengan PNG dan jarak rentang kendali pemerintahan inilah yang membuat daerah Pegunungan Bintang harus dimekarkan.

Kemudian untuk potensi wilayah yang dimiliki oleh Ketengban adalah palawija, sayuran, buah merah, kopi, kakao, vanili, cengkeh, sagu dan buah-buahan, serta memiliki budidaya ikan nila dan ikan mas. Kemudian untuk hasil tambang ya itu: Fe, Mg, Ni, Ag, au, Cu, Cr, Pt, andesit, besalt, gamping dan diolit.

Proses administrasi penetapan 'Ketengban' Sebagai Daerah Otonom Baru Dari Wilayah Pegunungan Bintang dilakukan dengan memenuhi Persyaratan Pembentukan Daerah Otonom Baru (PDOB), secara normatif telah di atur dalam PP. No. 78 Tahun 2007 tentang pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah meliputi Syarat administratif yaitu:

- a) Keputusan DPRD Kabupaten/Kota tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota.
- b) Keputusan Bupati/Walikota induk tentang persetujuan pembentukan calon Kabupaten/Kota;
- c) Keputusan DPRD provinsi tentang persetujuan pembentukan calon Kabupaten/Kota;
- d) Keputusan gubernur tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota; dan
- e) Rekomendasi menteri.

Peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh warga masyarakat merupakan cita-cita mulia setiap bangsa atau daerah, tidak terkecuali daerah otonom baru, Kabupaten Pegunungan Bintang Provinsi Papua. Oleh karena itu, pemerintah daerahnya senantiasa berusaha mengayomi dan mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan dengan cara berbuat (bekerja) sesuai kemampuan dan sumber daya yang dimiliki, agar cita-cita tersebut dapat dicapai.

Sesuai hasil analisis pembangunan ekonomi di Kabupaten Pegunungan Bintang maka sektor yang paling memberikan pengaruh adalah sektor bangunan, kemudian disusul sector pertanian dan sektor jasa-jasa. Sedangkan sektor-sektor ekonomi lainnya belum menunjukkan kontribusi yang cukup berarti.

Sektor bangunan memberikan kontribusi yang berarti berupa peningkatan kuantitas sarana dan prasarana, seperti pembangunan jalan raya, perbaikan bandara udara, sarana pelayanan sektor publik, dan perbaikan infrastruktur dasar lainnya. Sedangkan sektor pertanian merupakan sektor basis atau sector unggulan kedua karena daerah tersebut sebagian besar pegunungan dan sebagian besar penduduknya bekerja di sector pertanian.

Kondisi ini mendukung pengembangan sektor primer sebagai sektor basis atau unggulan yang menunjang pembangunan ekonominya.

Selanjutnya, sektor jasa-jasa juga merupakan sektor basis atau sector unggulan di Kabupaten Pegunungan Bintang.

Subsektor yang paling banyak memberikan kontribusi adalah pemerintahan umum, sedangkan sector lainnya belum mampu memberikan kontribusi yang berarti karena daerah tersebut merupakan daerah yang baru berkembang. (Wawancara: Informan-2, 18-4-2022).

Dampak Pemekaran Kabupaten Pegunungan Bintang merupakan daerah otonomi baru hasil pemekaran dari Kabupaten Jayawijaya yang berusaha memacu pembangunannya di berbagai bidang, termasuk di bidang ekonomi.

Dalam penelitian ini, analisa SWOT digunakan untuk mengetahui strategi apa yang seharusnya diterapkan oleh daerah otonom baru dari Wilayah Pegunungan Bintang.

Memanfaatkan peluang pasar melalui analisa terhadap faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi daerah otonom baru.

Analisa SWOT melibatkan faktor internal, yaitu kekuatan dan kelemahan daerah otonom baru dan faktor eksternal, yaitu peluang dan ancaman yang dihadapi oleh daerah otonom baru.

Penghitungan Analisis Faktor-Faktor Internal (IFAS) pada Penetapan Ketengban sebagai daerah otonom baru dari Wilayah Pegunungan Bintang dapat ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 1. Penghitungan IFAS pada Penetapan Ketengban Sebagai Daerah Otonom Baru

Faktor-faktor strategis internal	Bobot	Rating	Bobot x rating
Kekuatan (<i>strength</i>)			
1. Posisi geografis calon DOB dalam menunjang otonomi daerah dan pengembangan wilayah yang strategis.	0.096	3	0.288
2. Jumlah Penduduk yang banyak	0.096	3	0.288
3. Ketersediaan infrastruktur dasar seperti sarana pendidikan, kesehatan, irigasi, dan infrastruktur jalan.	0.129	4	0.516
4. Potensi pendapatan yang sangat besar dari sektor industri dan potensi pertanian terutama tanaman pangan	0.129	4	0.516
5. Sarana penunjang ekonomi memadai	0.129	4	0.516
Sub Total	0.58	18	2.124
Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)			
1. Disparitas pendapatan dan pertumbuhan ekonomi yang cukup besar antara wilayah yang berbasis sektor pertanian dengan wilayah yang berbasis sektor industri	0.096	3	0.288
2. Penyebaran infrastruktur yang belum merata	0.096	3	0.288
3. pengelolaan Sumberdaya alam yang belum optimal	0.064	2	0.128
4. SDM masih kurang	0.064	2	0.128
5. Percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah	0.096	3	0.288
Sub total	0.42	13	1.12

Sedangkan untuk penghitungan faktor eksternal (EFAS) disusun dengan cara yang sama seperti dengan cara menyusun matriks faktor internal (IFAS) akan tetapi kekuatan diganti dengan peluang, sedangkan kelemahan diganti dengan ancaman. Hasil penghitungan EFAS terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2. Penghitungan EFAS pada Penetapan Ketengban Sebagai Daerah Otonom Baru

Faktor-faktor strategis eksternal	Bobot	Rating	Bobot x rating
Peluang (Opportunities)			
1. Kondisi perekonomian yang semakin membaik, ditunjukkan dengan tingkat PDRB yang semakin meningkat	4	0.16	0.64
2. Kebijakan Pemerintah Daerah yang mengakomodir kajianpotensi daerah otonom baru	4	0.16	0.64
3. Perkembangan Teknologi dan adanya kerjasama dengan pihak swasta	3	0.12	0.36
4. Adanya perundang-undangan dan peraturan tentang otonomi daerah	3	0.12	0.36
Sub Total	14		2
Ancaman (Threats)			
1. Ketidakstabilan politik dan keamanan nasional	3	0.12	0.36
2. Adanya migrasi penduduk dari daerah lain yang menjadi saingan dengan penduduk lokal	3	0.12	0.36
3. Persaingan dengan daerah lain	2	0.08	0.24
4. Tingginya migrasi dan aktivitas menimbulkan perubahan fungsi lahan pertanian	3	0.12	0.36
Sub total	11		1.32

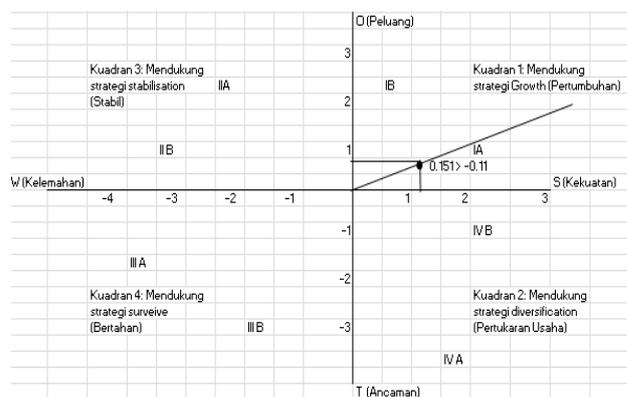
Berdasarkan tabel 1. di atas faktor-faktor kekuatan (strengths) mempunyai nilai skor sebesar 2.124 sedangkan faktor-faktor kelemahan (weaknesses) mempunyai nilai skor sebesar 1.12. Berarti daerah otonom baru mempunyai kelemahan yang lebih tinggi dibandingkan faktor kekuatan dalam menentukan Penetapan Ketengban sebagai daerah otonom baru dari Wilayah Pegunungan Bintang.

Selanjutnya pada Tabel 2. di atas, faktor-faktor peluang (*opportunities*) mempunyai nilai skor sebesar 2 dan faktor-faktor ancaman (*threats*)

mempunyai nilai skor sebesar 1.32. Dari nilai skor tersebut menunjukkan bahwa Penetapan Ketengban sebagai daerah otonom baru dari Wilayah Pegunungan Bintang mempunyai peluang dan kekuatan sehingga ia dapat memanfaatkan peluang secara maksimal sehingga mampu menerapkan strategi yang mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif.

Setelah mengetahui matriks SWOT dimana didapat mengkombinasikan faktor internal Penetapan Ketengban sebagai daerah otonom baru dari Wilayah Pegunungan Bintang dengan faktor eksternal dalam mewujudkan Penetapan Ketengban sebagai daerah otonom baru dari Wilayah Pegunungan Bintang.

Untuk mengetahui kondisi pencapaian daerah otonom baru maka akan digambarkan dalam diagram analisis SWOT dari hasil pembobotan faktor IFAS dan EFAS. Hal ini untuk mengetahui analisis Penetapan Ketengban sebagai daerah otonom baru dari Wilayah Pegunungan Bintang untuk dapat melakukan pengembangan strategi daerah otonom baru.



Gambar 1. Diagram analisis SWOT dari hasil pembobotan faktor IFAS dan EFAS

Selanjutnya, matriks SWOT adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Analisis Matriks SWOT

	Strength (S)	Weakness (W)
	1. Posisi geografis calon DOB dalam menunjang otonomi	1. Disparitas pendapatan dan pertumbuhan ekonomi yang cukup

EFAS	<p>IFAS</p> <p>daerah dan pengembangan wilayah yang strategis.</p> <ol style="list-style-type: none"> Jumlah Penduduk yang banyak Ketersediaan infrastruktur dasar seperti sarana pendidikan, kesehatan, irigasi, dan infrastruktur jalan. Potensi pendapatan yang sangat besar dari sektor industri dan potensi pertanian terutama tanaman pangan Sarana penunjang ekonomi memadai 	<p>besar antara wilayah yang berbasis sektor pertanian dengan wilayah yang berbasis sektor industri</p> <ol style="list-style-type: none"> Penyebaran infrastruktur yang belum merata pengelolaan Sumberdaya alam yang belum optimal SDM masih kurang Percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah
Opportunities (O)	Strategi S-O	Strategi W-O
<ol style="list-style-type: none"> Kondisi perekonomian yang semakin membaik, ditunjukkan dengan tingkat PDRB yang semakin meningkat Kebijakan Pemerintah Daerah yang mengakomodir kajianpotensi daerah otonom baru Perkembangan Teknologi dan adanya kerjasama dengan pihak swasta Adanya perundang-undangan dan peraturan tentang otonomi daerah 	<ol style="list-style-type: none"> Posisi geografis calon DOB yang strategis untuk pengembangan wilayah dan jumlah penduduk yang banyak merupakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang adanya peraturan dan perundang-undangan tentang otonomi daerah. Ketersediaan infrastruktur dasar seperti sarana pendidikan, kesehatan, irigasi dan infrastruktur jalan menjadi kekuatan untuk memanfaatkan peluang kebijakan pemerintah terkait otonomi daerah. Sarana penunjang ekonomi yang cukup banyak merupakan kekuatan untuk menagkap peluang kondisi perekonomian yang semakin baik 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan investasi dan kerjasama dengan pihak swasta untuk membantu meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas wilayah yang berbasis pertanian Meningkatkan penggunaan teknologi tepat guna dan intensifikasi dalam bidang pertanian untuk mengatasi kendala rendahnya produktivitas pertanian sehingga dapat meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk-produk pertanian.

Threats (T)	Strategi S-T	SStrategi W-T
<ol style="list-style-type: none"> Ketidakstabilan politik dan keamanan nasional Adanya migrasi penduduk dari daerah lain yang menjadi saingan dengan penduduk lokal Persaingan dengan daerah lain Tingginya migrasi dan aktivitas menimbulkan perubahan fungsi lahan pertanian 	<ol style="list-style-type: none"> Posisi geografis yang strategis menjadi kekuatan untuk meminimalkan ancaman terhadap persaingan dengan daerah lain. Kualitas sumberdaya manusia yang cukup tinggi, merupakan kekuatan untuk memperkecil ancaman persaingan antara penduduk lokal dengan pendatang dan persaingan dengan daerah lain Ketersediaan infrastruktur yang cukup dan sarana penunjang ekonomi yang cukup banyak merupakan kekuatan untuk memperkecil ancaman persaingan dengan daerah lain. 	<ol style="list-style-type: none"> Menggali potensi wilayah yang berbasis pertanian agar memperkecil disparitas pendapatan wilayah untuk memperkecil tingkat perubahan fungsi lahan pertanian Mengembangkan sektor pertanian sesuai dengan potensi yang dimiliki wilayahnya.

Berdasarkan matriks Internal eksternal di atas daerah otonom baru di wilayah Pegunungan Bintang berada pada nilai dari matriks IFAS adalah Kekuatan (*Strenghts*) adalah nilai 2.124 dan dari matriks EFAS adalah peluang (*Oportunity*) adalah

nilai 2, Hal ini berarti bahwa strategi yang direkomendasikan adalah strategi Kekuatan (*Strenghts*) dan Peluang (*opportunity*) atau dikenal dengan strategi SO, yaitu gunakan kekuatan untuk mengatasi peluang. Analisa strategi yang dijalankan dalam model pengembangan strategi bersaing growth adalah strategi Matriks IE dan diagram SWOT adalah menunjukkan Kuadran I yang artinya situasi menguntungkan karena madrasah mempunyai peluang dan kekuatan sehingga ia dapat memanfaatkan peluang secara maksimal sehingga mampu menerapkan strategi yang mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif.

4. KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan, antara lain :

Pertama, Perlunya dilakukan penetapan daerah otonom baru dari Wilayah Pegunungan Bintang, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai regulasi yang mengatur pemerintahan daerah sesuai amanat UUD 1945, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Nomor 32 Tahun 2004) yang mengatur secara jelas pemberlakuan otonomi daerah, begitu pula dalam hal pembentukan daerah atau pemekaran wilayah.

Aspirasi pembentukan Daerah Otonomi Baru Papua dapat dilakukan salah satunya dengan mempertimbangkan kepentingan strategis nasional dalam rangka mengokohkan NKRI. Dengan pemerintah membuat Undang-undang Nomor 2 tahun 2021 sebagai pengganti Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Hal itu berdasarkan usul dari rakyat Papua, sesuai pasal 77. DPR mengatakan sudah melibatkan orang-orang asli Papua dan menampung aspirasinya. Dengan demikian, pemerintah harus memperhatikan kondisi geografi; luas daerah Papua, daerah pantai, daerah pegunungan, keterisolasian daerah, kondisi demografi; jumlah penduduk, penyebaran penduduk tidak merata, proses pembangunan

masyarakat Papua, serta kondisi sosial budaya masyarakat.

Kedua, Hal-hal yang menjadi perhatian penetapan 'Ketengban' Sebagai Daerah Otonom Baru Dari Wilayah Pegunungan Bintang dilakukan dengan memenuhi Persyaratan Pembentukan Daerah Otonom Baru (PDOB), secara normatif telah di atur dalam PP. No. 78 Tahun 2007 tentang pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah meliputi Syarat administratif yaitu: Keputusan DPRD Kabupaten/Kota tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota ; Keputusan Bupati/Walikota induk tentang persetujuan pembentukan calon Kabupaten/Kota; Keputusan DPRD provinsi tentang persetujuan pembentukan calon Kabupaten/Kota; Keputusan gubernur tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota; dan Rekomendasi menteri.

Berdasarkan Laporan Singkat rapat dengar pendapat umum Komisi II DPR RI telah menyampaikan bahwa DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang juga menyampaikan materi-materi kelengkapan persyaratan administrasi yang sebelumnya oleh Komisi II DPR RI dinilai masih ada beberapa kekurangan persyaratan administrasi. Dimana kelengkapan administrasi yang diserahkan ke komisi II DPR RI yang isinya bahwa: *pertama*, Persetujuan Gubernur Papua (Keputusan Gubernur Papua/ Nomor 135/1305/set pada 9 Mei 2012 dan Nomor:119/2011/pada 20 Juli 2011) terkait persetujuan pembentukan calon Kabupaten Ketengban di Provinsi Papua dengan lokasi calon ibukota, *kedua*, Persetujuan DPR Papua (DPR Papua/Nomor:135/668/DPRP/ 2012) terkait pembentukan calon Kabupaten Ketengban di Provinsi Papua dengan lokasi calon ibukota, *ketiga* Keputusan Bupati Pegunungan Bintang terkait dukungan dana melalui APBD.

Ketiga, Manfaat yang didapatkan dari penetapan 'Ketengban' Sebagai Daerah Otonom Baru ditinjau dari aspek Percepatan pertumbuhan ekonomi Dari Wilayah Pegunungan Bintang dapat dilihat pada peningkatan taraf hidup dan

kesejahteraan seluruh warga masyarakat merupakan cita-cita mulia setiap bangsa atau daerah, tidak terkecuali daerah otonom baru, Kabupaten Pegunungan Bintang Provinsi Papua. Oleh karena itu, pemerintah daerahnya senantiasa berusaha mengayomi dan mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan dengan cara berbuat (bekerja) sesuai kemampuan dan sumber daya yang dimiliki, agar cita-cita tersebut dapat dicapai. Selain itu Pegunungan Bintang Provinsi Papua, dalam membangun atau mengembangkan daerahnya mengalami percepatan peningkatan. Kebijakan desentralisasi pemerintahan yang melahirkan otonomi daerah ini juga merupakan esensi dan orientasi bagi pengembangan berbagai sektor pembangunan bidang ekonomi, terutama dilihat dari indikator Produk Domestik Regional Bruto. Kontribusi yang diberikan adalah berupa pengembangan berbagai sektor basis atau sektor unggulan yang diharapkan mampu membangkitkan daya saing daerah. Sektor basis atau sector unggulan yang menunjang pembangunan Kabupaten Pegunungan Bintang adalah sektor bangunan, kemudian sector pertanian dan sektor jasa-jasa.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rojali. (2002) *"Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif"*, Jakarta: Raja Grafindo
- Adipuryanti Y, Ni Luh Putu, Sudibya, I ketut. (2015). Analisis pengaruh Jumlah Penduduk Yang Bekerja Dan Investasi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Melalui Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *Jurnal PIRAMIDA Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia*. XI (1). 20-28.
- Adisasmita, Rahardjo (1989), *Beberapa Dimensi Ekonomi Regional*, Fakultas Pascasarjana, Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang.
- Afandi, Muhamad Nur, (2013). *Peluang Dan Tantangan Pembangunan Daerah Otonom Baru Di Indonesia (Studi Kasus Kabupaten*

- Pangandaran Provinsi Jawa Barat), *Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol. X No. 2,
- Ahmad, Mubariq (1993), *Irian Jaya dalam Perspektif Pembangunan Ekonomi Nasional dan Daerah*, Ekonomi dan Keuangan Indonesia, Vol. XLI, No 4: 441 – 459.
- Arikunto, S. 2014. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arsyad, Lincoln, (1999). *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Edisi Pertama, Penerbit PBF-Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Artana Y, I Komang Oka, & Arka, Sudarsana. (2015). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Pendapatan Antardaerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Bali. *Jurnal JEKT Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*. 8(1). 63-71.
- Baswir, Revisond. (1997). *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. BPFE: Yogyakarta
- Blakely, E.J. (1989). *Planning Economic Development Theory and Practice*. Sage Publication 3
- Boediono. (2012). *Ekonomi Internasional*. Yogyakarta : BpFE
- Creswell, John W. (2015). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Dumairy, 2004. *Perekonomian Indonesia*, Cetakan kelima, Penerbit Erlangga,. Jakarta.
- Gunawan, Jamil. Ed., (2005). *Desentralisasi Globalisasi dan Demokrasi Lokal*. Jakarta: LP3ES,
- Hukom, Alexandra. (2014). Hubungan Ketenagakerjaan Dan Perubahan Struktur Ekonomi terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal JEKT Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Palangka Raya*. 7 (2). 120-129.
- Ibrahii, Mohammad Jimmi. (1991) *Prospek Otonomi Daerah*, Semarang, Dahara Prize,
- Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun (1945)*, ps. 18
- Miles dan Huberman. (2009). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI-Press.
- Moleong, Lexy J. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Putri, Agnes Febriana dan I Wayan Wita Kesumajaya. (2017). Analisis Pengaruh Modal, Tingkat Upah dan Teknologi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Serta Produksi pada Industri Kerajinan Batako. *E- Jurnal EP Unud*, 6 [3] :387-413.
- Richardson, H.W. (1991). *Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Regional*. Lembaga Penerbit FEUI. Jakarta
- Ridwan, Juniarso dan Achmad Sodik Sudradjat, (2014) . *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik*, Bandung: Nuansa Cendekia,
- Rosidin, Utang. (2010), *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, Bandung, CV Pustaka Setia.
- Seran, Serilius. (2017). Hubungan Antara Pendidikan, Pengangguran Dan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Kemiskinan. *Jurnal JEKT Univesitas Timor(Unimor)- Fakultas Ekonomi dan Bisnis*, 10(1). 59-71
- Sirojuzilam, (2008). Disparitas Ekonomi dan Perencanaan Regional, Ketimpangan Ekonomi Wilayah Barat dan Wilayah Timur Provinsi Sumatera Utara. Pustaka Bangsa Press
- Suartha, Nyoman, Murjana Yasa, I Gusti Wayan. (2017). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Migrasi Masuk Terhadap Pertumbuhan Penduduk dan Alih Fungsi bangunan Penduduk Asli Kota Denpasar. *Jurnal JEKT Universitas Udayana*, 10(1). 95- 107.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, S., (2010), *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sumartini, L. (1999), *Peranan dan Fungsi Rencana dan Legislasi Nasional dalam Proses Pembentukan Peraturan Perundang-*

Undang. BPHN Kehakiman RI, Jakarta hlm
3

Tarigan, Robinson. (2004). *Perencanaan
Pembangunan Wilayah*. Jakarta: PT Bumi
Aksara

Todaro, M.P, (2000), *Economic Development*,
Seventh Editions, New York, Addition Wesley
Longman, Inc.

Widjaja, HAW. (2005). *Penyelenggaraan Otonomi
di Indonesia*, Jakarta, Karisma Putra Utama
Offset,

Widodo, Tri. (2006). *Perencanaan Pembangunan
Aplikasi Komputer*. UPP STIM YKPN
Yogyakarta.